

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bertolak dari keseluruhan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan fundamental.

Pertama, ekologi sosial yang dikembangkan oleh Murray Bookchin merupakan suatu proyek intelektual yang bersifat holistik sekaligus emansipatoris. Berlandaskan naturalisme dialektis sebagai fondasi epistemologis, Bookchin memahami alam bukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang menuju tingkat kesadaran diri yang lebih tinggi. Dalam kerangka teleologis ini, manusia sebagai *second nature* merupakan artikulasi reflektif dari *first nature*, sehingga memikul tanggung jawab rasional dan etis untuk mengarahkan evolusi sosial menuju kebebasan yang autentik. Kebebasan tersebut tidak bersifat individualistik, melainkan sosial-ekologis—yang hanya mungkin terwujud melalui praksis desentralisasi ekologis, demokrasi langsung, dan penghapusan struktur hierarkis. Dalam perspektif ini, hierarki sosial dipahami sebagai akar genealogis dari seluruh bentuk dominasi, yang dalam konteks modern menemukan artikulasinya dalam simbiosis antara kapitalisme dan negara-bangsa sebagai kekuatan yang secara sistemik mereproduksi krisis ekologis.

Kedua, kebijakan pengembangan panas bumi di Flores merepresentasikan manifestasi konkret dari tesis Bookchin mengenai kristalisasi hierarki sosial dalam konfigurasi kapitalisme dan negara-bangsa. Logika akumulasi kapital yang digerakkan oleh imperatif *grow or die* mereduksi alam semata-mata sebagai komoditas, sebagai “sumber daya” yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Dalam relasi ini, negara (*statecraft*) tidak hadir sebagai penjaga kepentingan publik yang imparsial, melainkan sebagai agen yang memfasilitasi ekspansi kapital melalui legitimasi hukum, mekanisme birokratis, serta aparat koersif yang menjamin kelangsungan proyek-proyek ekstraktif. Penetapan sepihak Flores sebagai *Geothermal Island*, pengabaian prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), praktik konsultasi yang bersifat monologis, hingga keterlibatan kekuatan militer

dalam meredam resistensi masyarakat, merupakan indikasi nyata dari operasi dominasi tersebut. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material-ekonomis, tetapi juga menjangkau dimensi eksistensial: terjadinya alienasi total yang mencakup keterputusan relasi kosmologis dengan alam, disintegrasi tatanan sosial, serta kerusakan ekologis yang mengancam keberlanjutan hidup.

Ketiga, meskipun kerangka analisis Murray Bookchin terbukti memiliki daya kritis yang signifikan dalam mengungkap akar struktural dari krisis sosial-ekologis, pendekatan ini tidak luput dari keterbatasan. Kecenderungan pada rasionalisme sekuler, potensi antroposentrisme terselubung, serta determinisme struktural menunjukkan adanya ruang refleksi kritis yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Dalam konteks masyarakat adat, dimensi spiritualitas, kosmologi lokal, serta relasi simbolik dengan alam tidak dapat direduksi ke dalam kerangka rasionalitas instrumental semata. Oleh karena itu, pengayaan konseptual terhadap ekologi sosial menjadi suatu keniscayaan, terutama dengan mengintegrasikan perspektif yang mengakui subjektivitas alam, kedalaman motivasi moral berbasis spiritualitas, serta analisis ideologis terhadap wacana kekuasaan yang membentuk kesadaran sosial.

Dengan demikian, kritik yang diajukan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap ekologi sosial, melainkan sebagai afirmasi reflektif yang memperluas horizon emansipatorisnya. Dalam terang itu, perjuangan masyarakat adat Flores harus dipahami bukan sekadar sebagai resistensi terhadap proyek pembangunan, melainkan sebagai artikulasi kedaulatan ekologis: suatu tuntutan etis dan politis untuk menolak dominasi, menegaskan martabat sebagai subjek, serta mempertahankan hak untuk menentukan secara otonom horizon keberadaan mereka sendiri.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan tiga hal mendasar ini. Pertama, pengintegrasian FPIC secara substansial ke dalam seluruh kebijakan energi. Artinya, menempatkan masyarakat sebagai subjek berdaulat atas kehidupannya sendiri dengan didukung oleh mekanisme kelembagaan independen yang

transparan dan setara. Kedua, hukum perlindungan masyarakat adat segera disahkan dan diakui dalam sistem hukum nasional sebagai prasyarat yuridis keadilan yang substantif. Keputusan yang sentralistik perlu didesentralisasikan agar masyarakat memiliki kendali atas ruang hidupnya sendiri berdasarkan prinsip subsidiaritas yang diakui, baik dalam hukum nasional maupun internasional. Ketiga, pemerintah perlu melakukan mekanisme akuntabilitas yang nyata, yakni pelaporan yang transparan terkait dampak ekologis-sosial, prosedur pemulihan yang jelas dan terarah bagi masyarakat terdampak, dan penghentian narasi tunggal panas bumi sebagai energi “hijau” dan “ramah lingkungan” yang bebas nilai.

5.2.2 Bagi Kaum Akademisi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kajian tentang energi panas bumi sampai saat ini masih didominasi oleh pendekatan teknis dan ekonomis, dan karena itu, minim kajian dengan pendekatan dimensi sosial, kultural, dan ekologis, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat adat. Untuk itu, kaum akademisi perlu mengisi celah ini. Pertama, memperluas penelitian yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pengetahuan yang memiliki otoritas epistemik atas pengalaman dan realitas hidup mereka sendiri. Kedua, membangun dan mengembangkan penelitian lintas disiplin untuk memahami konflik sosial-ekologis secara holistik. Ketiga, para akademisi di NTT, khususnya di Flores, perlu membangun *community-based research* yang berguna secara langsung bagi advokasi masyarakat adat.

5.2.3 Bagi Masyarakat Adat

Perlawanan yang kuat, sistematis, dan terorganisir, yang dilakukan masyarakat adat perlu ditopang dengan beberapa hal berikut. Pertama, dokumentasi resistensi dan dokumentasi kejahatan. Dokumentasi resistensi berupa sistem pengetahuan masyarakat adat dan sejarah kepemilikan tanah adat. Sementara dokumentasi kejahatan berupa bukti kekerasan korporasi dan negara serta advokasi hukum yang terorganisasi, baik secara luring maupun daring, misalnya pembuatan platform digital. Kedua, penguatan solidaritas melalui pembentukan jaringan yang melampaui sekat etnis, agama, dan batas wilayah, demi merumuskan gerakan

perlawanan sosial yang terorganisir yang dilandasi nilai-nilai kolektif: kedaulatan komunitas, keadilan ekologis, dan penolakan terhadap segala bentuk hierarki dan dominasi. Ketiga, mempertahankan dan menguatkan relasi kosmik, spiritual, dan kultural. Ini adalah satu cara penguatan identitas yang relevan melalui pemahaman akan kearifan lokal yang dimiliki bersama.

5.2.3 Bagi Mahasiswa IFTK Ledalero

Mahasiswa perlu mengembangkan kemampuan kritis dan etis yang bukan hanya pada level abstraksi, melainkan juga pada level praktis. Untuk itu, pertama, mahasiswa didorong untuk memahami isu-isu konkret yang terjadi secara lebih mendalam dan melihatnya tidak hanya sebagai isu politik atau lingkungan, tapi juga persoalan yang menyentuh martabat manusia, kedaulatan komunitas, dan kepentingan generasi mendatang. Kedua, bersikap rendah hati secara intelektual untuk terbuka dan belajar dari pelbagai kearifan lokal sebagai sumber inspirasi etis. Ketiga, bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan pemikiran Bookchin lebih lanjut, kiranya memperluas analisisnya dengan memperhatikan dimensi spiritualitas, antroposentrisme terselubung, dan psikologis-ideologis wacana kekuasaan.